



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 194/KPTS/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 26 JUNI 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Dasar Pertimbangan dan Arah Kebijakan Perubahan Renja PD Tahun 2025.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	5
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.....	17
3.2 Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.....	20
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V : PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025.....	11
Tabel 3.2 : Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul....	21

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 194/ KPTS / 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang berisi arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA. 2025, APBD TA. 2025 serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 didasarkan pada hasil analisis terhadap data terakhir pada saat dokumen disusun yaitu pada tahun 2024. Data yang ada tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan proyeksi dan asumsi-asumsi kondisi yang akan terjadi pada tahun 2025. Proyeksi dan asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyusun arah kebijakan, target kinerja yang akan dicapai serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tersebut, proyeksi dan asumsi yang telah disusun sering terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini seiring dengan perkembangan kondisi yang terjadi pada tahun rencana baik yang terjadi dalam lingkup internal Kabupaten Gunungkidul maupun dari luar, diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang terkait dengan Pemerintah penyelenggaraan pembangunan di daerah. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang dimulai akhir bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini, juga sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Perubahan kondisi yang terjadi tentunya harus direspon oleh pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian rencana agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat secara lebih efektif memberikan manfaat kepada masyarakat.

Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2025, sehingga dapat terwujud sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan. Untuk mewujudkan hal itu perlu disusun pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh semua Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan menetapkan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Mendasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Dan Kmk Nomor 29 Tahun 2025.
21. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Perubahan Renja PD tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan perangkat daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan.

B. Tujuan

Perubahan Renja PD Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan perubahan APBD tahun 2025. Secara rinci tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu perubahan Rencana Kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja dengan melihat sumber daya yang dimiliki;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ditahun 2025;
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebagai dasar perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

Secara normatif perangkat daerah dapat melakukan Perubahan Renja PD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan, asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kondisi Pandemi Covid-19;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan
5. Penggunaan anggaran disesuaikan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Tindaklanjut Surat Edaran Bupati Nomor 1 Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan perubahan Renja PD Tahun 2025, secara umum terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah serta kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah, maka dilakukan perubahan terhadap prioritas kebijakan pendapatan dan belanja pada APBD Perubahan Tahun 2025 dalam Perubahan Kebijakan Umum (KUP) Tahun 2025 sehingga :

1. Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025;
2. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat;
3. Menggerakkan Perangkat Daerah agar kreatif meraih sumber pendapatan (*creative financing*) di luar DAU Umum dan Earmark (angara lain DAK, DAIS, TP, Perguruan Tinggi, BUMN, CSR, BAZNAS, memperluas kerjasama dengan Instansi Vertikal, Pihak Swasta dan lain-lain);
4. Pemenuhan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2024;
5. Penyesuaian Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabagar APBD Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
6. Pengendalian inflasi daerah, penurunan kemiskinan, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem;
7. Penanganan dampak bendana;
8. Peningkatan investasi daerah;
9. Optimalisasi implementasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) minimal 40% dari pagu anggaran Belanja Modal dan Barang dan Jasa; dan
10. Optimalisasi implementasi reformasi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun arah kebijakan perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 mencakup :

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Dasar Pertimbangan dan Arah Kebijakan Perubahan Renja PD Tahun 2025

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

3.2 Program dan Kegiatan Pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua) program pada bidang urusan pemerintahan daerah melalui 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Pada umumnya kegiatan tahun 2025 telah dilaksanakan. Capaian kinerja renja yang dievaluasi 16,69% dengan penyerapan dana sampai dengan bulan Maret sebesar Rp1.416.278.086.

Berikut capaian kinerja dan penyerapan dana masing-masing program dan kegiatan:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Indikator keluaran : - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Capaian kinerja : 0.09% dengan target kinerja 0.27%
 - Penyerapan dana : 42.08% dengan target 100%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Indikator keluaran : - Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 0%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Indikator keluaran : - Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 0%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Indikator keluaran : - Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - Capaian kinerja : 0.7% dengan target kinerja 0.7%
 - Penyerapan dana : 58,24% dengan target 100%
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Indikator keluaran : - Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 0.7%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Indikator keluaran : - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Capaian kinerja : 0.2% dengan target kinerja 0.2%
 - Penyerapan dana : 52,53 % dengan target 100%
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator keluaran : - Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 0.16%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%

- Keterangan deviasi : SPIP, SKM, dan SOP akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Indikator keluaran : - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
 - Capaian kinerja : 7.81% dengan target kinerja 31.65%
 - Penyerapan dana : 16,78 % dengan target 100%
 - Keterangan deviasi : Pembayaran gaji ASN direalisasikan setiap bulan
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Indikator keluaran : - Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Capaian kinerja : 0.5% dengan target kinerja 0.5%
 - Penyerapan dana : 16,82% dengan target 100%
 - Keterangan deviasi : Sisa anggaran akan digunakan untuk penyusunan draft laporan keuangan Tahun 2025
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Indikator keluaran : - Jumlah laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi
 - Capaian kinerja : 0.27% dengan target kinerja 1.27%
 - Penyerapan dana : 13,76% dengan target 100%
 - Keterangan deviasi : Laporan keuangan bulanan dan upah THL dilaksanakan setiap bulan berjalan
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Indikator keluaran : - Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 0%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
 - Keterangan deviasi : Pengadaan Pakaian akan di alihkan
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Indikator keluaran : - Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 2.11%
 - Penyerapan dana : 24,75% dengan target 100%
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Indikator keluaran : - Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 0%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
 - Keterangan deviasi : Belum ada permintaan peserta diklat dari Kemendagri
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Indikator keluaran : - Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0.4% dengan target kinerja 0.8%
 - Penyerapan dana : 30,97% dengan target 100%
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator keluaran : - Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0.32% dengan target kinerja 0.65%
 - Penyerapan dana : 9,61% dengan target 100%
 - Keterangan : Belanja modal akan dilaksanakan pada deviasi triwulan berikutnya
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Indikator keluaran : - Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0.13% dengan target kinerja 0.40%
 - Penyerapan dana : 51,27% dengan target 100%
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Indikator keluaran : - Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0.12% dengan target kinerja 0.49%
 - Penyerapan dana : 8,59% dengan target 100%
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- Indikator keluaran : - Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0.01% dengan target kinerja 0.03%
 - Penyerapan dana : 16,67% dengan target 100%
 - Keterangan : Tagihan koran dibayarkan setiap bulan deviasi
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Indikator keluaran : - Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu
 - Capaian kinerja : 0,07% dengan target kinerja 0,41%
 - Penyerapan dana : 39,71% dengan target 100%
 - Keterangan : Realisasi anggaran berdasarkan tamu yang hadir di Sat Pol PP
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Indikator keluaran : - Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Capaian kinerja : 0,54 % dengan target kinerja 2,54%
 - Penyerapan dana : 1,88% dengan target 100%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Pengadaan Mebel
- Indikator keluaran : - Jumlah paket mebel yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 100%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Indikator keluaran : - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 100%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Indikator keluaran : - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 100%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Indikator keluaran : - Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
 - Capaian kinerja : 0,47% dengan target kinerja 1,90%
 - Penyerapan dana : 14,91% dengan target 100%
 - Keterangan : Pembayara upah THL dilaksanakan setiap deviasi bulan
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Indikator keluaran : - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
 - Capaian kinerja : 0,07% dengan target kinerja 0,29%
 - Penyerapan dana : 20,38% dengan target 100%
 - Keterangan : Tagihan air dibayarkan oleh Bagian Umum deviasi Setda
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Indikator keluaran : - Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya
 - Capaian kinerja : 1,10% dengan target kinerja 4,02%
 - Penyerapan dana : 18,45% dengan target 100%
- b. Pemeliharaan Mebel
- Indikator keluaran : - Jumlah mebel yang dipelihara
 - Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 50%
 - Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Indikator keluaran : - Jumlah peralatan dan mesin lainnya
 - Capaian kinerja : 0,04% dengan target kinerja 0,12%
 - Penyerapan dana : 22,92% dengan target 100%
 - Keterangan : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan deviasi kebutuhan pemeliharaan peralatan
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Indikator keluaran : - Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi
 - Capaian kinerja : 0,57% dengan target kinerja 2,87%
 - Penyerapan dana : 0,10% dengan target 100%
 - Keterangan : Pemeliharaan AC dan Gedung akan deviasi dilaksanakan pada TW berikutnya

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

- Indikator keluaran : - Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan
- Capaian kinerja : 0,02% dengan target kinerja 0,09%
- Penyerapan dana : 0% dengan target 100%
- Keterangan : Tidak adanya konflik sosial deviasi

b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

- Indikator keluaran : - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
- Capaian kinerja : 0,58% dengan target kinerja 2,73%
- Penyerapan dana : 15,66% dengan target 100%
- Keterangan : Kegiatan penyuluhan dilaksanakan deviasi berdasarkan koordinasi dengan narasumber

c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

- Indikator keluaran : - Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya
- Capaian kinerja : 4,06% dengan target kinerja 18,70%
- Penyerapan dana : 15,48% dengan target 100%
- Keterangan : Pembayaran gaji THL dan SRI dilaksanakan deviasi setiap bulan

d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Indikator keluaran : - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- Capaian kinerja : 4,62% dengan target kinerja 20,04%
- Penyerapan dana : 22,10% dengan target 100%

e. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Indikator keluaran : - Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia
- Capaian kinerja : 0% dengan target kinerja 0%
- Penyerapan dana : 0% dengan target 100%

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

- Indikator keluaran : - Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/pelaku usaha usaha
- Capaian kinerja : 0,31% dengan target kinerja 1,40%
- Penyerapan dana : 26,54% dengan target kinerja `100%
- Keterangan : Sosialisasi akan dilaksanakan pada deviasi semester II

b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

- Indikator keluaran : - Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota
- Capaian kinerja : 0,36% dengan target kinerja 2,87%
- Penyerapan dana : 16,37% dengantarget 100%
- Keterangan : Kegiatan akan dilaksanakan pada semester deviasi II

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Indikator keluaran : - Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP
- Capaian kinerja : 0,45% dengan target 2,86%
- Penyerapan dana : 15,37% dengan target 100%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
1.05.1.05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		3 Dokumen;	3 Dokumen;	100%	2 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen		2 Dokumen;	2 Dokumen;	100%	2 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.05	Perubahan Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen		2 Dokumen;	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	75%	6 Laporan		
1.05.1.05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1960 Orang		490 Orang	490 Orang	100%	462 Orang		
1.05.1.05.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laproan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52 Laporan		13 Dokumen;	13 Dokumen;	100%	13 Laporan		

1.05.1.05.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	408 paket		101 paket	101 paket	100%	0 paket		
1.05.1.05.01.01.2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang		2 Orang	0 Orang	0%	3 Orang		
1.05.1.05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket		1 paket	1 paket	100%	2 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket		6 paket	6 paket	100%	5 paket		
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket		1 paket	1 paket	100%	3 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 paket		5 paket	5 paket	100%	29 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2920 dokumen		730 dokumen	730 dokumen	100%	24 dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 laporan		10 Laporan	10 Laporan	100%	12 Laporan		
1.05.1.05.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 laporan		36 Laporan	36 Laporan	100%	33 Laporan		

1.05.1.05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	97 Unit		71 Unit	71 Unit	100%	0 Unit		
1.05.1.05.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit		17 Unit	17 Unit	100%	0 Unit		
1.05.1.05.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	100%			
1.05.1.05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan		
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	100%	36 Laporan		
1.05.1.05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			258 Unit	258 Unit	100%	271 Unit		
1.05.1.05.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	210 Unit		42 Unit	42 Unit	100%	54 Unit		
1.05.1.05.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatah dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit		24 Unit	24 Unit	100%	26 Unit		

1.05.1.05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	20 Unit		
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum									
1.05.1.05.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	10 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	100%	33 Dokumen		
1.05.1.05.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11.490 Orang		2148 Orang	2148 Orang	100%	1368 Orang		
1.05.1.05.01.02.2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	80 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100%	13 Dokumen		
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	100%	20 Laporan		

1.05.1.05.01.02.2.01.08	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	510 Stel		6102 Unit	6102 Unit	100%	0 Stel		
1.05.1.05.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kanupaten/Koata Dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
1.05.1.05.01.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupaati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha			13 Laporan	13 Laporan	100%	18 Laporan		
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	894 Laporan		148 Laporan	148 Laporan	100%	85 Laporan		
1.05.1.05.01.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	639 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	100%	82 Laporan		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan tahun 2025, secara langsung Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian prioritas daerah kelima ketentraman dan ketertiban dengan sasaran daerah adalah ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat. Sasaran ini digambarkan dengan indikator indeks ketentraman dan ketertiban. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung sasaran daerah ini adalah penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat. Selain sasaran perangkat daerah yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat satu sasaran perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PD yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja PD.

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan PD yaitu terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dari Renstra PD kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah yang disusun setahun sekali. Namun dalam pelaksanaan rencana kerja, terkadang ditemukan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan harus dilakukannya perubahan rencana kerja tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya, proyeksi dan asumsi yang telah disusun tidak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga diperlukan adanya perubahan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, dan kelompok sasaran.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Berikut hal – hal yang melatarbelakangi perubahan beberapa program dan kegiatan prioritas :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Latar belakang : refocussing anggaran.
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Latar belakang : refocussing anggaran.
 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Latar belakang : refocussing anggaran.
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Latar belakang : tambahan gaji THL, karena SPT pada tanggal merah yang tidak terakomodir dalam SPPD.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Latar belakang : tagihan air dibayarkan oleh Bagian Umum Setda.
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Latar belakang : refocussing anggaran.

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Latar belakang : refocussing anggaran.
- B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa
Latar belakang : tidak terjadi konflik social
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Latar belakang : refocussing anggaran.
 - c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Latar belakang : kegiatan kesamaptaan untuk pejabat.
 - d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kententraman dan Ketertiban Umum
Latar belakang : -
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
Latar belakang : penambahan anggaran dari DBHCHT untuk kegiatan penyampaian informasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Latar belakang : efisiensi anggaran untuk kegiatan monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum dan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Perda dan ketertiban umum.
 - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Latar belakang : penambahan anggaran dari DBHCHT untuk kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Tabel 3.1.1
Prioritas dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Tujuan PD Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026 dalam Renstra 2021-2026	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026 dalam RKPD Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026 dalam Perubahan Renja 2025
Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	96,5	97,5	97,5	97
	Presentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	96,5	97,5	97,5	97
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,56	83,56	83,56	82,56

Tabel 3.1.2
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Capaian IKU PD Tahun 2024	Target Kinerja IKU PD Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2021-2026	Proyeksi Perubahan Target IKU PD Tahun 2025
Presentase penyelesaian pelanggaran K3	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	96,5	97	97
Presentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Presentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	96,5	97	97
Nilai AKIP PD	Nilai AKIP PD	82,56	82,56	82,56

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Perubahan RKPD dan Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan Arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Maka dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam draft Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dan Renstra PD Tahun 2025-2029 maka perlu dituangkan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025-2029 dalam Perubahan RKPD dan Renja PD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.3
Draft Tujuan dan Sasaran PD dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum	Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen	96,5	97	
			Presentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Persen	96,5	97	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	82,56	83,56	

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan indikator. Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) program yang terbagi menjadi 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja PD Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Perangkat Daerah : 1.05. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025						Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Ket	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1,5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.500.221.358	8.508.045.840	(1.007.824.482)				7.134.686.540			
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	4.342.534.658	4.551.143.540	(208.608.882)				4.216.543.540			
1.5.1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan tersusun	Jumlah dokumen perencanaan tersusun	30 dokumen	30 dokumen	56.412.700	58.515.000	(2.102.300)				35.900.000			
1.5.1.2. 01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari,	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	24.760.000	22.930.000	1.830.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	12.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2. 01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	4.110.000	(1.110.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.000.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.5.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	4.110.000	(1.110.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.000.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	6.010.000	(2.510.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3.000.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	6.010.000	(3.510.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5.592.700	7.520.000	(1.927.300)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Laporan	7.700.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6 Laporan	14.060.000	7.825.000	6.235.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	8.700.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah administrasi keuangan terfasilitasi	Jumlah administrasi keuangan terfasilitasi	504 Laporan	504 Laporan	2.636.197.160	2.801.121.442	(164.924.282)				3.330.510.352		
1.5.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	2.538.237.160	2.696.591.442	(158.354.282)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	490 Orang/bulan	3.218.510.352	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja

1.5.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.050.000	4.460.000	1.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	91.910.000	100.070.000	(8.160.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	105.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah ASN terfasilitasi	Jumlah ASN terfasilitasi	108 Orang	108 Orang	446.600.000	214.480.800	232.119.200				233.470.000			
1.5.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	102 Paket	0 Paket	181.850.000	-	181.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	102 Paket	185.220.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	6 Dokumen	4.750.000	179.480.800	(174.730.800)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	11.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	2 Orang	260.000.000	35.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang	36.750.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah administrasi umum terfasilitasi	Jumlah administrasi umum terfasilitasi	776 kegiatan	776 kegiatan	633.310.700	465.125.700	168.185.000				250.033.188			
1.5.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	6.410.000	7.034.000	(624.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.750.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11 Paket	116.196.700	130.416.700	(14.220.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	25.250.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.5.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8 Paket	3.599.000	81.399.000	(77.800.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	29 Paket	44.295.000	21.000.000	23.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Paket	24.983.188	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen	4.800.000	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	730 Dokumen	3.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13 Laporan	24.800.000	35.000.000	(10.200.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	22.050.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	36 Laporan	433.210.000	187.876.000	245.334.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	165.000.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah penyediaan jasa penunjang terlaksana	Jumlah penyediaan jasa penunjang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	134.098.508	203.252.328	(69.153.820)				101.230.000			
1.5.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12 Laporan	109.829.000	162.210.000	(52.381.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	86.750.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	37 Laporan	24.269.508	41.042.328	(16.772.820)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	14.480.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	338 kegiatan	338 kegiatan	435.915.590	808.648.270	(372.732.680)				265.400.000			

1.5.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	271 Unit	271 Unit	341.200.000	341.200.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	258 Unit	211.150.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit	3.100.000	3.100.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 Unit	2.700.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	28 Unit	10.890.000	11.850.000	(960.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Unit	16.850.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	27 Unit	80.725.590	452.498.270	(371.772.680)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	34.700.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Prosentase ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana	Prosentase ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana	97 persen	97 persen	3.157.686.700	3.956.902.300	(799.215.600)				2.918.143.000			
1.5.2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi	10 kegiatan	10 kegiatan	2.691.621.000	3.499.526.000	(807.905.000)				2.669.993.000			
1.5.2.2.01.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Laporan	2 Kasus	7.200.000	7.200.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kasus	18.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.5.2.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	38 Dokumen	33 Dokumen	242.300.000	231.750.000	10.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	34.500.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1368 Orang	1178 Orang	1.873.585.000	1.586.605.000	286.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1178 Orang	2.356.993.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13 Dokumen	13 Dokumen	568.536.000	1.673.971.000	(1.105.435.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	260.000.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.01.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0Unit	0 Unit	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	102 Stel	-	Baru	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Jumlah Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Terasilitasi	Jumlah Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Terasilitasi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	466.065.700	457.376.300	8.689.400				248.150.000		
1.5.2.2.02.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	13 Laporan	18 Laporan	126.341.500	118.396.000	7.945.500	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0 Laporan	-	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja

1.5.2.2.02.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	222 Laporan	85 Laporan	244.489.000	88.164.000	156.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	81 Laporan	173.150.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.02.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	85 Laporan	82 Laporan	95.235.200	250.816.300	(155.581.100)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	82 Laporan	75.000.000	Sedang berjalan	Satuan Polisi Pamong Praja
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							-	-	-				-		
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			Prosentase kelompok jagawarga yang terbina	Prosentase kelompok jagawarga yang terbina	-	-	-	-	-				-		
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			Jumlah kelompok jaga warga yang terbentuk	Jumlah kelompok jaga warga yang terbentuk	-	-	-	-	-				-		
2.22.8.5.07.12	Pembinaan Jagawarga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	-	-	-	-	-				-		
								7.500.221.358	8.508.045.840	(1.007.824.482)						

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan PD yang disusun untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian rencana agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat secara efektif memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan perkembangan kondisi yang terjadi pada tahun rencana baik yang terjadi dalam lingkup internal Kabupaten Gunungkidul maupun dari luar.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Wonosari, 26 JUNI 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

